



PENGARUH PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP REALISASI APBD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Murni Dahlena Nasution
Junita Putri Rajana Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Jl. Garu II No. 93 Kampus A Medan
Email : murninasution1301@gmail.com

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran pemerintahan daerah yang disalurkan dan dilaksanakan untuk lembaga dan pemerintahan daerah. Dinas kehutanan sebagai pengguna dan pelaksana APBD memiliki beberapa faktor seperti perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam merealisasikan APBD nya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perencanaan dan pelaksanaan anggaran terhadap realisasi APBD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh sebesar 80% dari variabel perencanaan dan pelaksanaan anggaran terhadap realisasi APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Realisasi APBD

ABSTRACT

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a regional government budget that is implemented for local institutions and governments. The forestry office as the user and implementer of the APBD has several factors such as planning and implementing the budget in realizing its APBD. This study aims to see the effect of planning and budget execution on the realization of the APBD at the Forestry Service of North Sumatra Province. The results of the study indicated that there was an influence of 80% of the variable planning and budget execution on the realization of the APBD of the Forestry Service of North Sumatra Province.

Keywords: Planning, Implementation, APBD Realization



1. PENDAHULUAN

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik akan memaksimalkan suatu organisasi alam mencapai tujuannya, baik tujuann jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Setiap lembaga organiasi pemerintah harus daat menyusun strategi sebagai alat dan jalan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Anggaran merupakan rencana tertulis suatu organisasi baik instansi pemerintahan atau lembaga-lembaga pemeritahan, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk jangka waktu tertentu, berupa angka atau satuan uang, atau bisa juga berupa berupa barang. Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi untuk dijadikan bahan taksiran.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Merupakan suatu kegiatan dan rencana pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan dan penerimaan serta belanja suatu daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengeluaran pemerintah ataupun lembaga dalam membangun dan mendukung kelancaran operasional ataupun kegiatan lembaga, tercemin dalam belanja modal, pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah maupun lembaga, seperti pengadaan transportasi, pembelian peralatan serta pembelian tanah, dan pengadaan fasilitas umum lainnya. Sebagai lembaga pemerintahan semestinya Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) atau dinas-dinas pemerintahan berperan penting guna meningkatkan dan menggerakkan tercapainya tujuan dan kesejahteraan pemerintahan daerah yang bersangkutan, peran yang dimaksud disini yaitu mengoptimalkan dan melancarkan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab masing masing SKPD atau dinas dan merealisasikan dengan baik

apa yang sudah direncanakan dan yang sudah disetujui oleh DPRD, yang nantinya akan bermanfaat bagi pemerintahan dan rakyat setempat.

Dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) lembaga pemerintahan ataupun dinas – dinas pemerintahan di Sumatera Utara pada umum nya masih rendah atau lambat dalam merealisasikan anggarannya contohnya saja pada tahun 2019 seperti yang sudah di beritakan dalam laman (Medanbisnisdaily.com Tahun 2019) realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) hingga pertengahan oktober baru mencapai 54,43% atau setara RP 8,460 triliun dari total APBD Sumut tahun anggaran 2019 sekitar RP15,430 triliun. Itu artinya angaran yang harus terealisasi RP.6,970 triliun pada akhir tahun 2019. sedangkan waktu yang tersisa hanya 2 bulan saja yakni tinggal november dan desember, dan tidak ada OPD satupun yang mencapai 80% per oktober 2019.

OPD yang anggarannya paling banyak terealisasi pada pertengahan oktober 2019 adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, yakni sebesar 65,49% atau sebesar RP 15,384 miliar dan disusul dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah, dan Dinas ketenaga kerjaan yang masing masing 63,02% dan 62,59%. (Medanbisnisdaily.com tahun 2019).

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dipimpin oleh kepala dinas yang nantinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dimana Dinas Kehutanan merupakan wakil Gubernur dalam urusan Kehutanan, yang berkoordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan di Provinsi Sumatera Utara, baik dalam penyusunan, perencanaan, dan pengevaluasian, sebagaimana yang



diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 3 huruf D. Dinas Kehutanan memiliki Tugas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah kewenangan Provinsi Sumatera Utara, dibidang inventarisasi dan penatagunaan Hutan, pengusaha Hutan ,dan perlindungan terhadap hutan.

Berdasarkan beberapa fenomena yang sudah dijelaskan diatas, yaitu lambatnya proses realisasi APBD yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka peneliti tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Realisasi APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara”**

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap realisasi APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap realisasi APBD Dinas Kehutanan Pemerintah Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara bersama-sama terhadap realisasi APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Perencanaan
Anggaran

Pelaksanaan
Anggaran

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual, diatas dapat diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah

perencanaann dan pelaksanaan anggaran, sedangkan variabel dependennya adalah realisasi APBD . penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana variabel independen perencanaan dan pelaksanaan anggaran mempengaruhi reaisasi APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

2. METODE

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda. Tujuan dari teknik analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel terikat (Erlina, 2011:111). Untuk menguji hipotesis, digunakan Model Regresi Linier Berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

Y = Realisasi APBD

b_1 = Koefisien regresi X_1

b_2 = Koefisien regresi X_2

X_1 = Perencanaan Anggaran

X_2 = Pelaksanaan Anggaran

e = *Error* / variabel yang tidak diteliti

Teknik yan dilakukan dalam menyimpulkan hasil penelitian akan menggunakan SPSS.

Uji Hipotesis

- a. Koefisien Determinasi (R^2) untuk menentukan apakah model regresi cukup baik digunakan, maka ditetapkan melalui koefisien determinasi. Nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali,2016).
- b. Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan pengujian analisis regresi linier berganda, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-1,884	2,744		-,687	,497
X1	,570	,094	,545	6,053	,000
X2	,630	,117	,485	5,384	,000

Model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -1,884 + 0,570 X_1 + 0,630 X_2$$

Berdasarkan hasil regresi linier berganda tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -1,8842, yang berarti jika semua variabel independen (perencanaan dan pelaksanaan anggaran) bernilai nol, maka nilai variabel dependen (realisasi APBD) adalah sebesar -1,884.
2. Nilai besaran koefisien regresi X1 (perencanaan anggaran) adalah 0,570 berarti jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka variabel Y (realisasi APBD) akan mengalami peningkatan sebesar 0,570 satuan.
3. Nilai besaran koefisien regresi X2 (pelaksanaan anggaran) adalah 0,630 berarti jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka variabel Y (realisasi APBD) akan mengalami peningkatan sebesar 0,630 satuan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,902 ^a	,814	,802	1,02542

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.802 yang artinya bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat mempengaruhi realisasi APBD sebesar 80,2% dan sisanya sebesar 19,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-1,884	2,744		-,687	,497
X1	,570	,094	,545	6,053	,000
X2	,630	,117	,485	5,384	,000

Dari tabel 2 diatas maka dapat di ambil keputusan bahwa semua variabel independen secara parsial atau sendiri sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen atau Realisasi APBD seperti penjelasan berikut ini :

1. Untuk variabel X1 yaitu Perencanaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar $6,053 > t$ tabel yaitu 2.0423 sehingga diambil kesimpulan bahwa perencanaan anggaran (X1)



berpengaruh terhadap realisasi APBD (Y).

2. Untuk variabel X2 yaitu Pelaksanaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar $5,384 > t$ tabel yaitu 2.0423 sehingga diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan anggaran (X2) berpengaruh terhadap realisasi APBD (Y).

Uji Parsial (Uji-F)

Hasil uji simultan (Uji-F) dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	147,095	2	73,548	69,947	,000 ^b
	Residual	33,647	32	1,051		
	Total	180,743	34			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 3 diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai f sebesar 69,947. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap realisasi APBD.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perencanaan maupun Pelaksanaan Anggaran memiliki pengaruh secara parsial terhadap Realisasi APBD.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran secara simultan (secara

bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap realisasi APBD.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bastian Indra. 2016. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Erlangga Yogyakarta.

Ghozali Imam. 2011. Analisis Multivariat Program IBM SPSS. Universitas Dipongoro.

Halim Abdul, Syam Muhammad. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Salemba 4 Jakarta.

Medan Bisnis daily. 2019. Penyerapan anggaran dinas kehutanan rendah dprd sumut salahkan gubernur Edy. (online). Tersedia: http://www.google.com/amp/www.medanbisnisdaily.com/amp/news/online/read/2019/06/24/78824/penyerapan_anggaran_dinas_kehutan_an_rendah_dprd_sumut_salahkan_gubernur_edy/?espv=1. Html (19 Desember 2019).

Medan bisnis daily. 2019. Jelang akhir 2019, serapan anggaran pemprov sumut masih 54%. (online). Tersedia: http://www.google.com/amp/s/www.medanbisnisdaily.com/amp/news/online/read/2019/10/14/89409/jelang_akhir_2019_serapan_anggaran_pemprov_sumut_masih_54/?espv=1. Html (19 Desember 2019).

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Andi : Yogyakarta.

Nurkholis, khusaini .2019. Akuntansi Sektor Publik.

Ruwaida, Darwanis, syukri Abdullah. 2015. Faktor Faktor yang memengaruhi realisasi belanja pendidikan di provinsi Aceh.



Rusita Untari.2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Saridewi Anak Agung Ayu Nitia, Andreas Noak Piers, Supriyanti Ni Wayan. 2013. Analisis Faktor-Faktor



yang mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar.

Sasongko Catur, Parulian Safrida Rumondang. 2010. Anggaran. Salemba Empat : Jakarta. Sinurat Marja. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Pustaka Rahmat : Bandung.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian. Alfabeta : Bandung.

Trihendradi Cornelius. 2013, Step By Step IPM SPSS 21 Analisis Data Statistik, Andi Yokyakarta : Yokyakarta.